

EFEKTIVITAS PELATIHAN KETRAMPILAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIL SKILLS TRAINING*) UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS¹

Roni K, Kusuma A, Hajan H, Roro Widayati, Galang L²

INTISARI

Dalam dasawarsa terakhir ini hampir semua negara memperjuangkan sistem kehidupan demokratis. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman adat istiadat didalamnya terkandung nilai-nilai kolektivitas yang mencerminkan kehidupan demokratis.

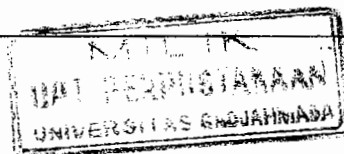
Namun, semakin derasnya arus informasi, perkembangan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih mengadopsi liberalisme menyebabkan nilai-nilai kolektivitas tersebut mengarah pada individualitas.

Seiring dengan meningkatnya kebebasan berpendapat muncul pula masalah-masalah yang melunturkan nilai-nilai budaya demokratis, masyarakat mengalami suatu bentuk luapan emosi (*euphoria*) dari keterungkungan selama orde baru menjadi kebebasan tanpa batas. Salah satu bentuk usaha internalisasi budaya nilai-nilai demokratis tersebut adalah program *civil education* (pendidikan kewarganegaraan). Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar merupakan usaha penting dalam sosialisasi dan internalisasi sikap demokratis. Sikap dan kebiasaan demokratis bukan terjadi secara otomatis tetapi harus menggunakan proses belajar yang akan membentuk suatu budaya politik yang fleksibel dan berdasar pikiran rasional sebagai dasar kekuatan demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ketrampilan kewarganegaraan efektif untuk meningkatkan sikap demokratis.

¹Lomba Karya Inovatif Produktif Tahun 2000. Dosen Pembimbingan Dra. Avin Fadilla Helmi, M.Si.

²Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



PENDAHULUAN

Gambaran dinamika di atas menunjukkan bahwa sikap demokratis masyarakat sebagian besar hanya pada

[Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk](http://core.ac.uk)

CORE

Provided by UGM Journals, OAI Repository

democratisation, dan strategi dalam *public policy* (Cooper, 1998; Utomo, 2000). Dalam dasawarsa terakhir ini hampir semua negara memperjuangkan suatu bentuk sistem kehidupan demokratis. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman adat istiadat didalamnya terkandung nilai-nilai kolektivitas yang mencerminkan kehidupan demokratis. Nilai gotong-royong, saling menghormati, musyawarah, keterbukaan, keseimbangan, penghargaan terhadap hak dan kewajiban, tidak adanya penekanan dan pemaksaan, tidak berprasangka buruk, bertanggung jawab, permusyawaratan, kekeluargaan, kesadaran, toleransi, dan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai budaya kolektivitas tersebut merupakan asset yang besar harganya untuk mendukung usaha demokratis. Namun, semakin derasnya arus informasi, perkembangan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih mengadopsi liberalisme menyebabkan nilai-nilai kolektivitas tersebut mengarah pada individualitas.

Seiring dengan meningkatnya kebebasan berpendapat muncul pula masalah-masalah yang melunturkan nilai-nilai budaya demokratis, masyarakat mengalami suatu bentuk luapan emosi (*euphoria*) dari keterungkungan selama orde baru menjadi kebebasan tanpa batas.

dalam kehidupan politik cenderung diabaikan. Internalisasi nilai-nilai demokratis merupakan usaha yang penting untuk meningkatkan kematangan sikap demokratis tersebut. Menurut Wiyono (Gunawan, Bernas 10 April 1999), kesadaran demokrasi masyarakat masih terbatas pada wacana kognisi dan belum membuahkan proses internalisasi nilai-nilai demokratis yang secara konsisten tercermin melalui kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk usaha internalisasi budaya nilai-nilai demokratis tersebut adalah program *civil education* (pendidikan kewarganegaraan). Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar merupakan usaha penting dalam sosialisasi dan internalisasi sikap demokratis. Sikap dan kebiasaan demokratis bukan terjadi secara otomatis tetapi harus menggunakan proses belajar yang akan membentuk suatu budaya politik yang fleksibel dan berdasar pikiran rasional sebagai dasar kekuatan demokrasi. Secara umum tujuan *civil education* adalah meningkatkan kemampuan rekognisi dan analisis isu-isu sosial politik, membangun mental setia akan konsekuensi tindakan yang dilakukan dalam jangka pendek maupun panjang, evaluasi antara manfaat pribadi dan sosial dari kebijakan/tindakan yang dilakukan, menciptakan iklim familiar dengan strategi yang

berarti untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi.

Civil education dapat dilakukan dengan sarana-sarana potensial seperti media massa (TV, radio, Koran) atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelajaran politik dan sikap demokratis. Menurut Avey, dkk (1999) ketrampilan kewarganegaraan juga dapat membentuk sosok manusia yang dinamakan *Good Citizens* yang mempunyai karakteristik taat pada hukum, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang menyangkut citizenship, berpartisipasi dalam diskusi atau debat tentang isu-isu *citizen*, ketertarikan pada *public affair* dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah pelatihan Ketrampilan Kewarganegaraan (*Civil Skills Training*) dapat meningkatkan sikap demokratis.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menambah kajian tentang Psikologi Politik khususnya usaha peningkatan sikap demokratis dengan memperhatikan proses belajar melalui pelatihan ketrampilan kewarganegaraan, dan menyumbangkan konsep psikologi dalam proses demokratis dalam bentuk suatu alternatif pemecahan masalah melalui pelatihan ini.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel bebas berupa Pelatihan Ketrampilan Kewarganegaraan (*Civil Skills Training*), sedangkan variable tergantung adalah sikap demokratis.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Sikap demokratis adalah kecenderungan individu untuk merespon situasi sosial berdasarkan nilai-nilai demokratis seperti keterbukaan, keseimbangan, penghargaan terhadap hak dan kewajiban, tidak adanya penekanan dan paksaan, tidak berprasangka buruk, dan lain-lain.
2. Pelatihan Ketrampilan Kewarganegaraan atau *Civil Skills Training* merupakan suatu proses belajar yang berisikan materi tentang ketrampilan seseorang berkaitan dengan fungsinya sebagai warga negara yaitu taat pada norma dan aturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi masalah kewarganegaraan, berpartisipasi dalam forum diskusi dan lain-lain.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan subjek penelitian adalah mahasiswa baru tahun pelajaran 2000/2001 dari beberapa fakultas, yaitu MIPA, Kehutanan, Psikologi, Ekonomi, ISIPOL dan Kedokteran Hewan.

Pemilihan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa

mahasiswa baru dapat menerima materi yang berkaitan dengan aspek kognitif sehingga dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memilih subjek yang mempunyai sikap demokratis rendah. Jumlah subjek adalah 24 orang dengan rincian 12 orang dalam kelompok eksperimen dan 12 sebagai kontrol.

Metode Pengumpulan Data

1. Skala Sikap Demokratis

Skala sikap demokratis bertujuan untuk mengetahui sikap demokratis seseorang. Skala yang disusun pernah dipergunakan sebelumnya dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Pelatihan Keterampilan Sosial untuk Meningkatkan Sikap Demokratis (Kausyar, Dzakiah, Setuastuti, Hendriani, dan Dewa, 1999).

2. Pelatihan Ketrampilan Kewarganegaraan

Pelatihan ini dilakukan dengan panduan modul atau paket pelatihan yang akan diberikan pada subjek yang berisi tentang cara-cara peningkatan keterampilan kewarganegaraan yang diterapkan dalam konteks sikap demokratis. Modul ini disusun berdasarkan aspek-aspek keterampilan kewarganegaraan dalam bentuk sesi-sesi pelatihan.

Validitas dan Reabilitas

Pengukuran variable sikap demokratis dalam penelitian ini menggunakan Skala Sikap Demokratis yang disusun oleh Kausyar, Dzakiah, Setuastuti, Hendriani, dan Dewa (1999).

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah uji t-test dari Software SPSS.W. versi 8.0. Uji t-test digunakan untuk menguji taraf signifikansi perbedaan rerata, dan selisih skor antara pre-test dan post-test sikap demokratis kontrol dan eksperimen.

Sebelum dilakukan uji t-test terlebih dahulu dilakukan uji asumsi berupa uji normalitas dan homogenitas. Uji asumsi ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji t-test, yaitu untuk mengetahui apakah skor sikap demokratis subjek berdistribusi normal dan mempunyai varian yang homogen. Apabila distribusinya normal dan mempunyai varian yang homogen, maka uji t-test dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Penelitian

Persiapan yang dilakukan meliputi pembuatan norma skor sikap demokratis, penyusunan modul pelatihan, pemilihan trainer, penyusunan interview guide, penyusunan behaviour checklist, dan persiapan media dokumentasi.

Pembuatan norma atau kategorisasi skor sikap de-

mokratis ini dilakukan berdasarkan perolehan skor skala sikap demokratis yang dilakukan terhadap 593 subjek. Hasilnya digunakan untuk menentukan batasan skor sikap demokratis dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Penyusunan modul pelatihan adalah dengan membuatnya dalam 11 sesi yang meliputi pembekalan, pengantar, ice breaking dan kontrak belajar, pengenalan diri sebagai warga negara, hukum dalam tatanan kehidupan, kemampuan komunikasi verbal, analisis isu-isu politik, partisipasi kehidupan politik, membangun pola *win-win solution*, membangun kepercayaan warga negara, refleksi anda dan demokrasi.

Pemilihan trainer dilakukan agar materi pada modul pelatihan bisa disampaikan secara kompeten oleh orang yang betul-betul memahami materi sesuai dengan bidang keilmuannya.

Interview guide disusun dalam bentuk catatan-catatan garis besar dan singkat tentang hal-hal yang ditanyakan, berkaitan dengan pendapat subjek, pengalaman, perasaan, dan kesan yang diperoleh sebelum, saat dan sesudah pelatihan.

Behavioral check list disusun berdasarkan aspek yang mengacu pada kerangka modul pelatihan untuk mencatat tiap perilaku yang dimunculkan subjek selama pelatihan.

Media dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa handy-cam, dan film slide projector untuk mendokumentasikan jalannya pelatihan.

● **Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pendaftaran peserta sebagai subjek kemudian dilakukan pre-test. Subjek yang memiliki skor dalam kategori rendah dikelompokkan menjadi kelompok kontrol, dan eksperimen, pembagian secara random. Pada proses pembagian ini ada 12 subjek yang masuk dalam kelompok eksperimen dan 12 dalam kontrol. Proses selanjutnya adalah pemberian pelatihan kepada kelompok eksperimen yang berlangsung selama 5 hari sebanyak 11 sesi. Jalannya pelatihan adalah sebagai berikut.

Pertemuan Pertama

Sesi ini diawali dengan pengenalan yang bertujuan untuk membina keakraban peserta dan pelatih serta peserta dengan peserta. Sesi pertama yaitu pengantar yang bertema warga negara dalam kehidupan demokratis serta yang terakhir adalah ice breaking dan kontrak belajar yang bertujuan untuk membuat suasana akrab antara peserta, pelatih, antara peserta sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peserta juga diminta untuk mengemukakan harapan-harapan mereka tentang pelatihan ini sehingga peserta menyadari kebutuhan mereka pada pelatihan ini dan termotivasi untuk ikut sampai akhir sesi. Sedangkan tujuan dari kontrak kerja adalah untuk membentuk komitmen dalam mengikuti rangkaian acara pelatihan.

Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua ini dimulai dengan ringkasan hari pertama dan masuk pada sesi tentang siapakah saya sebagai warga negara serta sesi tentang hukum dalam tatanan kehidupan.

Pertemuan Ketiga

Pertemuan ini diawali dengan ringkasan pertemuan pertama dan kedua secara singkat, kemudian dilanjutkan dengan sesi tentang kemampuan komunikasi verbal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya komunikasi efektif, memberikan teknik-teknik komunikasi efektif, mengalami bentuk permainan yang menunjukkan pentingnya komunikasi efektif, menyadari arti pentingnya komunikasi dalam sosialisasi politik melalui sarana komunikasi baik formal maupun informal, dan memberikan pengalaman untuk berbicara mengemukakan pendapat secara asertif. Sesi lainnya adalah tentang isu-isu politik, sesi ini bertujuan untuk melatih peserta supaya mampu membedakan antara fakta dan opini terhadap suatu isu politik, mengembangkan pola pikir kritis yaitu kemampuan mendengar, mengidentifikasi, dan menganalisis isu-isu politik.

Pertemuan Keempat

Pertemuan ini diawali ringkasan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kemudian dilanjutkan dengan sesi tentang partisipasi kehidupan politik. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta dapat membangun dan merumuskan suatu kerangka sikap dalam rangka berpartisipasi dalam kehidupan politik, mampu menyikapi fenomena politik dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana, membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi politik, dan mengetahui cara-cara serta saluran-saluran partisipasi politik. Materi tentang membangun pola Win-win Solution juga dipaparkan pada pertemuan ini. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kemampuan negosiasi dan arti pentingnya negosiasi, melatih peserta untuk melakukan negosiasi, memberikan kesadaran perlunya perbedaan-perbedaan yang berpotensi menjadi sumber konflik, menyadari perlunya komunikasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan konflik secara win-win solution, memahami seperti apa dirinya dalam menangani konflik sehingga dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat dan dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan konflik.

Pertemuan Kelima

Pertemuan ini diawali dengan ringkasan pertemuan sebelumnya dan dilanjutkan dengan materi membangun kepercayaan warga negara dan refleksi: anda dan demokrasi. Tujuan dari sesi pertama adalah untuk memberikan kesadaran bahwa ketidakpercayaan antara warga negara dan pemerintah akan menimbulkan hal-hal yang tidak mendukung kehidupan demokratis. Sedangkan tujuan dari

sesi kedua adalah untuk melakukan ulasan terhadap sesi-sesi yang sudah diikuti, menimbulkan harapan-harapan peserta terhadap demokrasi dan mendorong sosok warga negara yang good citizen.

Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. skor rata-rata pre- dan post-test

Kel.	Rata-rata skor		
	Pre-test	Post-test	gain
Eksperimen	138,4167	155,0833	16,6667
Kontrol	138,5833	141,7500	3,1667

2. Hasil Analisis Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan uji t-test, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ada beda nyata antara post- dan pre-test kelompok eksperimen dan kontrol ($t=4,416$; $p=0,000$)
- Ada beda nyata antara selisih pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan kontrol

3. Hasil Analisis Tambahan

Berdasarkan pengumpulan data dari behavioral check list diperoleh hasil sesuai tabel berikut:

Tabel 2. Perolehan Skor Behavioral Check List

Subjek	Perilaku		Prosentase
	Diharapkan	Tampak	
FS	45	20	44,44
LN	45	15	33,33
IL	45	17	37,78
AF	45	15	33,33
AW	45	30	66,67
IA	45	19	42,22
OH	45	12	26,67
AU	45	23	51,11
BP	45	17	37,78
SN	45	33	73,33
IF	45	26	56,85
DE	45	36	78,72
Rata-rata	X = 45	X = 21,92	X = 48,52

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata tentang sikap demokratis antara kelompok eksperimen dan kontrol. Rerata skor post-test kelompok eksperimen (155,0833) lebih tinggi dari pada kelompok kontrol (141,75). Kelompok eksperimen menunjukkan kenaikan yang berarti yang ditunjukkan dengan

perbedaan selisih pre- dan post-test antara kedua kelompok tersebut. Pelatihan keterampilan kewarganegaraan mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan sikap demokratis karena dapat digunakan sebagai suatu proses belajar/pendidikan demokrasi yang tersusun secara sistematis sehingga subjek mampu melihat, merasakan, dan bersikap secara nyata bentuk-bentuk keterampilan dalam konteks sikap demokrasi.

Faktor pendidikan sebagai media pembelajaran warga negara dalam kehidupan demokrasi harus benar-benar didukung oleh pendidikan yang berarah dan mempunyai tujuan yang jelas dan nyata.

Warga negara dalam suatu kehidupan demokrasi harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang kewarganegaraan, tanpa adanya proses belajar yang konkret tentang pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, maka warga negara akan sulit menjabarkan konsep demokrasi yang bisa dikatakan abstrak dan cenderung masih berupa idealitas.

Pelatihan keterampilan kewarganegaraan menjabarkan konsep-konsep keterampilan warga negara dalam setting demokrasi secara sistematis sehingga subjek mampu belajar secara bagian per bagian untuk mempermudah pemahaman tentang kehidupan proses demokrasi.

Berdasarkan hasil analisis tambahan behavioral check, selama pelatihan tampak 48,52% dari perilaku yang diharapkan muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat membuat subjek mampu melakukan hal-hal yang menjadi tujuan pelatihan walaupun kualitasnya belum optimal. Hal tersebut disebabkan frekuensi waktu pertemuan. Secara kognitif dan afektif subjek mampu menguasai konsep-konsep keterampilan kewarganegaraan yang diperoleh selama pelatihan, tetapi karena masih dalam setting pelatihan, perilaku yang muncul belum mencapai maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Keterampilan Kewarganegaraan (*Civil Skills Training*) efektif untuk meningkatkan sikap demokratis.

Saran

Masih diperlukan penelitian tentang hal ini untuk mengaitkan dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat dipengaruhi oleh keterampilan kewarganegaraan atau variabel-variabel lain yang mempengaruhi sikap demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Avery, P.G., dkk., 1999. *Issue Centered Approaches to Teaching Civics and Government*. Minnesota.
Bagus, L., 1996. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka

Utama. Jakarta.
Branson, dkk., 1999. *Belajar Civil Education dari Amerika*. LKIS. Yogyakarta.
Cincotta, 1991. *What is Democracy?* United State Information Agency. United State.
Gerungan, W.A., 1999. *Psikologi Sosial*. PT. Eresco. Bandung.
Kausyar, Dzakiah, Setyastuti, Hendriani, Dewa, 1999. *Efektivitas Pelatihan Keterampilan Sosial untuk*

Meningkatkan Sikap Demokratis. Laporan Penelitian. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
Sears, D.D., Freedman, Peplau L.A., 1988. *Psikologi Sosial* (terjemahan Ardiyanto dan Soekrisno). Erlangga. Jakarta.
Utomo, Warsito, 2000. *Nuansa Psikologis Kebijakan Publik*. Makalah Seminar Nasional: Wacana Civil Society dalam Perspektif Psikologi. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.